

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PADA DINAS TATA  
KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI**

Oleh:

**Wan Syaparudin**

Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau-Indonesia

**Sri Wahyuni**

Dosen Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: sriwahyuni@law.uir.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan kota Dumai antara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kebersihan dan pertamanan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode survey berdasarkan keadaan sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 yang menggunakan teori evaluasi Menurut Talizudhu Ndraha, Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan/ perlakuan (treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya. Metode penelitian bersifat analisis kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dari 33 orang responden dan dianalisis dengan mencari nilai rata-rata. Dari hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan variabel yang diteliti menunjukkan ada hubungan yang positif baik terhadap pelaksanaan sebelum maupun sesudah terbitnya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tersebut dengan hasil 57,33 % Kurang terlaksana. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (i) perlunya prosedur atau standar kerja yang bisa diimplementasikan oleh pegawai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan, (ii) pentingnya kerjasama antara Dinas/ Badan dan Kantor agar tidak terjadi tumpang tindih (*Overlapping*), tarik ulur pekerjaan serta saling menyalahkan diharapkan dapat dihindari apabila ada kejelasan dari pelaksanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan.

**Keyword:** Evaluasi, Kebijakan Publik dan Overlapping

**PENDAHULUAN**

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi yang ada di Kota Dumai yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 dimana sebelumnya bernama Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai. Seiring waktu dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dimana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dan perlu dievaluasi.

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai adalah organisasi daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2008 yang antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan.<sup>1</sup>
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:<sup>2</sup>
  - a) Perumusan kebijakan penataan ruang, penataan bangunan, perizinan bangunan, pertamanan dan pemakaman;
  - b) Perencanaan program perizinan bangunan, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman;
  - c) Pembinaan perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan;
  - d) Pengendalian dan penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;
  - e) Pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tata kota pertamanan dan pemakaman;
  - f) Pembinaan pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang penataan ruang, penataan bangunan, perizinan bangunan dan pemakaman;

Adapun fenomena-fenomena yang menjadi penghambat Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam melaksanakan amanat pemerintah antara lain:

1. Terjadinya pertentangan dan tumpang tindih (*Overlapping*) menurut pasal 17 dalam Peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah dalam hal Penataan Ruang dengan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Pasal 17 ayat (b) yakni: Perencanaan program perizinan bangunan, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman;
2. Terjadinya pertentangan dan tumpang tindih (*Overlapping*) menurut pasal 17 dalam Peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah dalam hal Pembinaan Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan dengan Badan Pelayanan Terpadu dan Investasi Kota Dumai. Pasal 17 ayat (c) yakni: Pembinaan perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan;
3. Terjadinya pertentangan dan tumpang tindih (*Overlapping*) menurut pasal 16 dalam Peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah dalam hal Penyelenggaraan Kewenangan tentang Kebersihan tentang Tugas Pokok Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan dengan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Pasal 16 berbunyi: Melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan;

Sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebagai organisasi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan serta pengendalian penyelenggaraan kewenangan bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai memerlukan kepastian dalam bertindak sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi bisa terwujud, oleh karena itu pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

---

<sup>1</sup> Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 16

<sup>2</sup> Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 17

Dinas Daerah Kota Dumai Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai dalam pencapaian Visi dan Misi dari Daerah harus dievaluasi.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai.
2. Bagaimanakah hambatan dan kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai.

Ruang lingkup dari permasalahan ini dibatasi pada permasalahan serta uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, terlihat bahwa Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai berperan dalam melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan di Kota Dumai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan.<sup>3</sup>

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Data yang bersumber dari responden penelitian berdasarkan questioner/ angket yang diberikan kepada responden yakni aparatur pemerintah yang ada di Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai yang berisikan pertanyaan seputar Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebelum dan sesudah terbentuknya yang difokuskan pada bidang kebersihan dan pertamanan apakah terlaksana, kurang terlaksana atau tidak terlaksana dimana 24 responden dari unsur bawahan dan 9 responden dari unsur pimpinan yakni kepala seksi (KASI), sementara 7 responden dari unsur pimpinan yang lainnya penulis lakukan dengan cara wawancara.

### **2. Data sekunder**

Data yang penulis dapat dari berbagai buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penulis.

Dalam penelitian digunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran ordinal yaitu memberikan nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan paling tinggi. Setiap item pertanyaan pada variabel tersebut menggunakan

---

<sup>3</sup> Singarimbun, 1987, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit, LP3ES. Hal 8

skala pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 3 (Tiga). Skor ini bersifat membedakan dan mengurutkan dimana Pedoman untuk pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Kategori jawaban Terlaksana diberi skor 3 (tiga).
2. Kategori jawaban kurang Terlaksana diberi skor 2 (dua).
3. Kategori jawaban tidak Terlaksana diberi skor 1 (satu).

Kategori jawaban diatas dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Seperti Sangat Perlu, Perlu, Tidak Perlu. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada 24 orang responden yaitu jajaran staf/ pelaksana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai, 9 orang responden dari unsur pimpinan yakni kepala seksi (KASI), sementara 7 responden dari unsur pimpinan yang lainnya penulis lakukan dengan cara wawancara untuk diisi jawabannya sesuai pertanyaan dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan. Sedang Data sekunder dapat dikumpulkan oleh penulis sendiri melalui catatan ataupun permintaan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kepada instrumen yang menjadi objek penelitian dalam hal ini Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai.

## **PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum terbitnya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008**

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum terbitnya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 difokuskan pada Pelaksanaan peraturan daerah dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dimana sebelum terbitnya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dilaksanakan sesuai ketentuan dari peraturan daerah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Lingkungan Hidup Kota Dumai.

### **Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008**

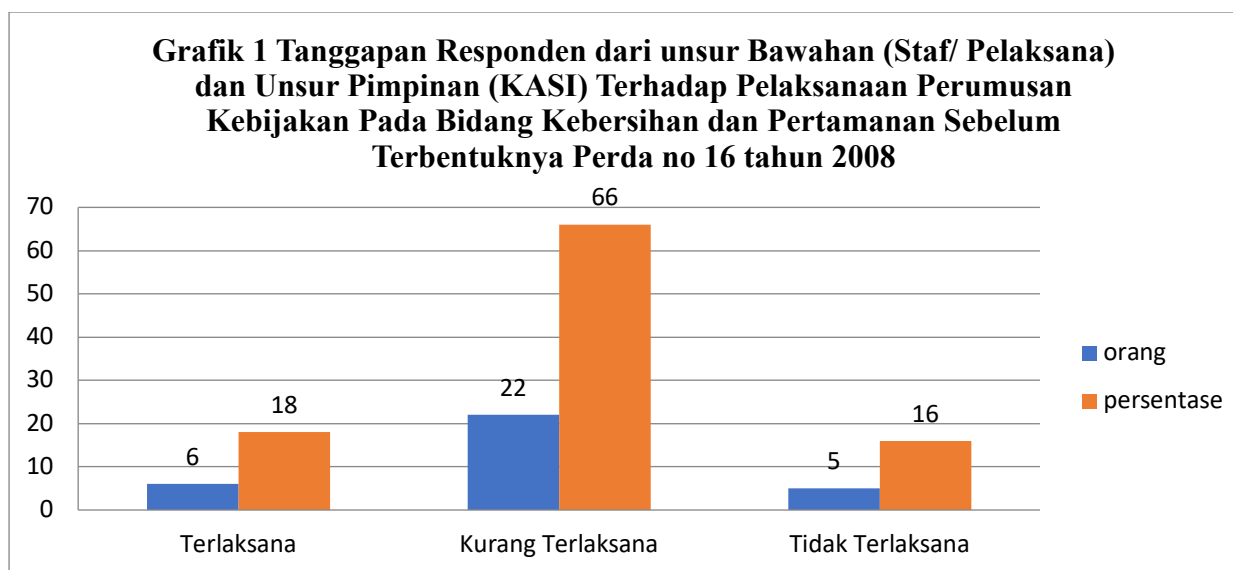
Perumusan kebijakan teknis pada prinsipnya berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) pekerjaan sehingga yang menjadi out put dari perumusan tersebut adalah adanya peningkatan kinerja, kejelasan dalam bertindak terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan. Beberapa penjelasan terkait hasil penelitian ini akan penulis colaborasikan dengan hasil wawancara, interpretasi penulis serta ditambahkan gambar diagram yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan selama melakukan penelitian di lapangan. Penjabaran hasil penelitian ini juga dijelaskan sesuai dengan indikator penelitian yang sudah penulis susun sedemikian rupa sehingga apa yang penulis sampaikan di dalam penelitian ini merupakan kondisi real dari jawaban para responden atau sampel penelitian yang penulis jumpai selama di lapangan.

Tabel 1 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)

No.	Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan	Responden		Total Responden	Persentase
		Unsur Bawahan (Staf/Pelaksana)	Unsur Pimpinan (KASI)		
1.	Terlaksana	5 Orang	1 orang	6 Orang	18 %
2.	Kurang Terlaksana	16 Orang	6 Orang	22 Orang	66 %
3.	Tidak Terlaksana	3 Orang	2 Orang	5 Orang	16 %
Jumlah		24 Orang	9 Orang	33 Orang	100 %

Sumber: Data Olah berdasarkan Angket

Berdasarkan Tabel di atas tentang tanggapan responden dari unsur bawahan (Staf/Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai terhadap Aspek Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 6 orang (18%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 22 orang (66%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 5 orang (16%)



Sumber: Data Olahan Penulis

### Pengkoordinasian Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008

Koordinasi merupakan salah satu hal penting guna menunjang kinerja yang baik serta terarah. Pada prinsipnya koordinasi itu sendiri berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi saling menyalahkan, saling tunggu dan tumpang tindih (*Overlapping*) pekerjaan sehingga pengkoordinasian terutama dalam hal kebersihan dan pertamanan adalah salah satu tolok ukur keberhasilan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan pertamanan.

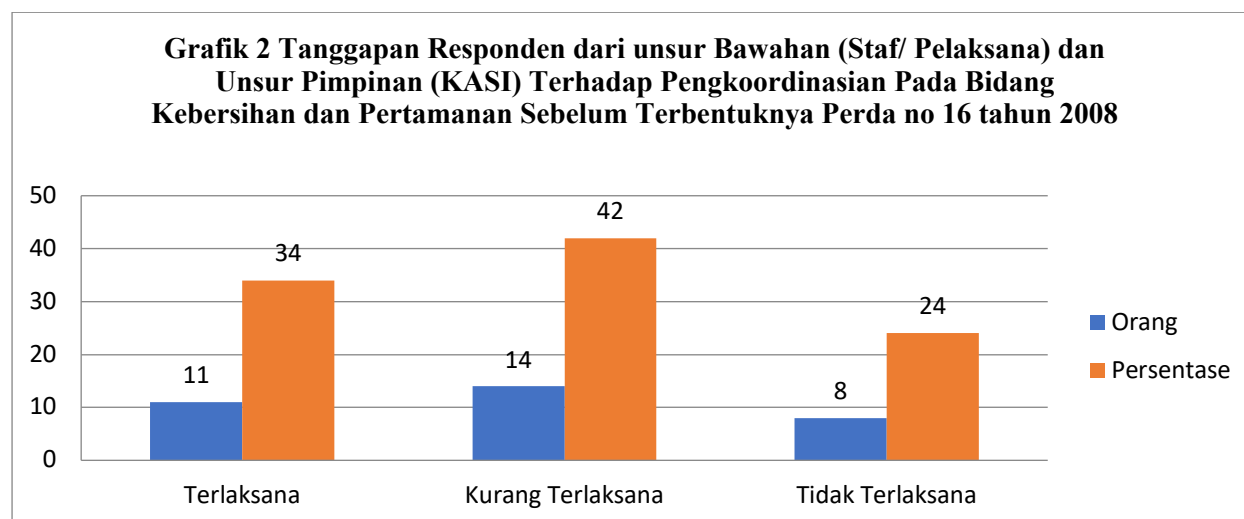
Tabel 2 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbit Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)

No.	Aspek Pengkoordinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan	Responden		Total Responden	Persentase
		Unsur Bawahan (Staf/Pelaksana)	Unsur Pimpinan (KASI)		
1.	Terlaksana	5 Orang	6 orang	11 Orang	34 %
2.	Kurang Terlaksana	12 Orang	2 Orang	14 Orang	42 %
3.	Tidak Terlaksana	7 Orang	1 Orang	8 Orang	24 %
Jumlah		24 Orang	9 Orang	33 Orang	100 %

Sumber: Data Olah berdasarkan Angket

Berdasarkan Tabel di atas tentang hasil tanggapan responden dari unsur bawahan (Staf/Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai terhadap Aspek Pengkoordinasian Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 11 orang (34%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 14 orang (42%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 8 orang (24%).

Hasil ini menunjukkan koordinasi yang dilakukan masih ditahap pimpinan saja karena tingginya ego sektoral membuat unsur bawahan dianak tirikan. Pernyataan tersebut dibenarkan dan dikuatkan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada unsur pimpinan yakni Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang dimana hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber: Data Olahan Penulis

### Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Baik itu pemerintahan maupun swasta pembinaan dan pengendalian kewenangan dalam hal peningkatan mutu kerja sangat dibutuhkan begitu pula halnya dengan Dinas Tata kota,

Kebersihan dan pertamanan Kota Dumai sehingga pemahaman tentang arti pentingnya kebersihan dan penataan pertamanan dapat terlaksana dengan baik.

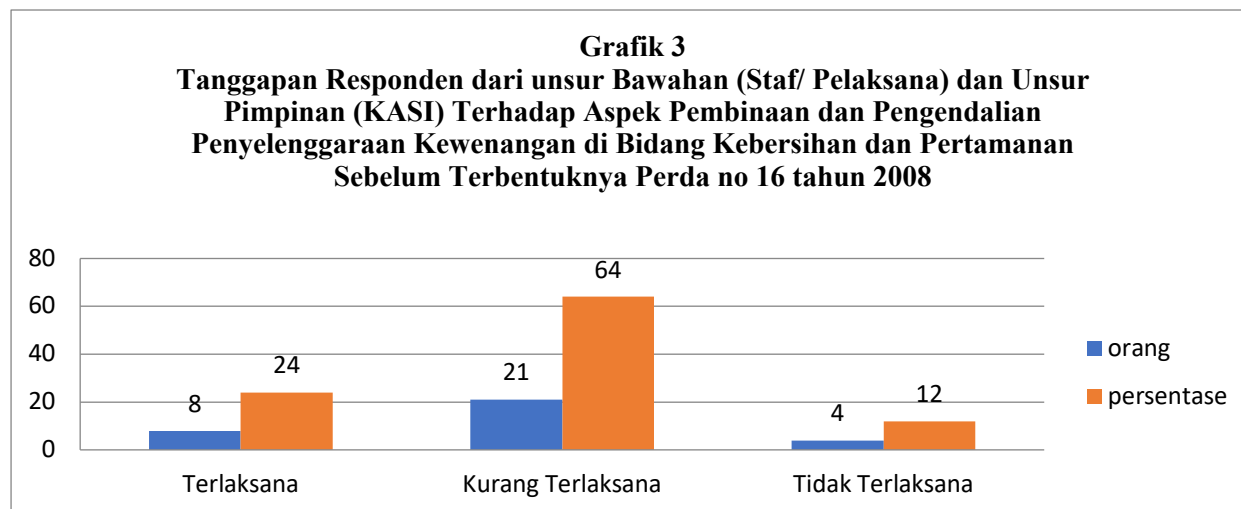
Pada aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 8 orang (24%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 21 orang (64%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 4 orang (12%)

Tabel 3. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)

No.	Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Responden		Total Responden	Persentase
		Unsur Bawahan (Staf/Pelaksana)	Unsur Pimpinan (KASI)		
1.	Terlaksana	4 Orang	4 orang	8 Orang	24 %
2.	Kurang Terlaksana	17 Orang	4 Orang	21 Orang	64 %
3.	Tidak Terlaksana	3 Orang	1 Orang	4 Orang	12 %
Jumlah		24 Orang	9 Orang	33 Orang	100 %

Sumber: Data Olah berdasarkan Angket

Hasil ini menunjukkan bahwa Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang dilakukan masih sangat kurang karena kurangnya pemahaman dan keinginan untuk memahami arti penting dari penyelenggaraan bidang kebersihan dan pertamanan, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber: Data Olahan Penuli

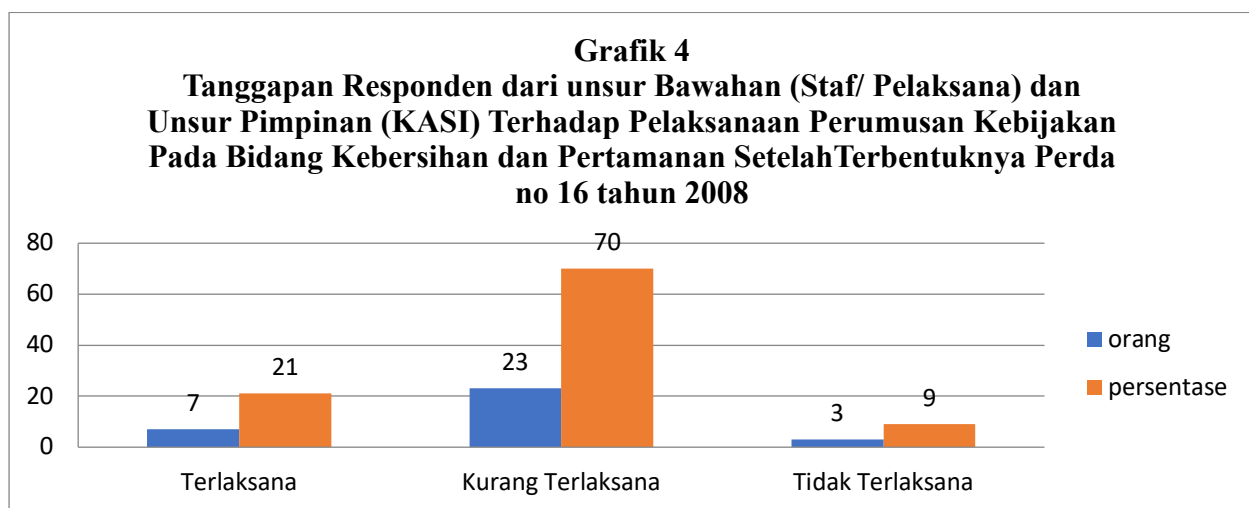
**Evaluasi Pelaksanaan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008**

Dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan setelah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan Tabel di dibawah tentang tanggapan responden dari unsur bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai terhadap Aspek Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Bidang Kebersihan dan Pertamanan setelah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 7 orang (21%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 23 orang (70%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 3 orang (9%).

Tabel 4 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)

No.	Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan	Responden		Total Responden	Persentase
		Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana)	Unsur Pimpinan (KASI)		
1.	Terlaksana	5 Orang	2 orang	7 Orang	21 %
2.	Kurang Terlaksana	17 Orang	6 Orang	23 Orang	70 %
3.	Tidak Terlaksana	2 Orang	1 Orang	3 Orang	9 %
Jumlah		24 Orang	9 Orang	33 Orang	100 %

Sumber: Data Olah berdasarkan Angket



Sumber: Data Olahan Penulis



### Mengkoordinasikan Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008

Pada prinsipnya koordinasi itu sendiri berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi saling menyalahkan, saling tunggu dan tumpang tindih (*Overlapping*) pekerjaan sehingga pengkoordinasian terutama dalam hal kebersihan dan pertamanan adalah salah satu tolok ukur keberhasilan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan pertamanan.

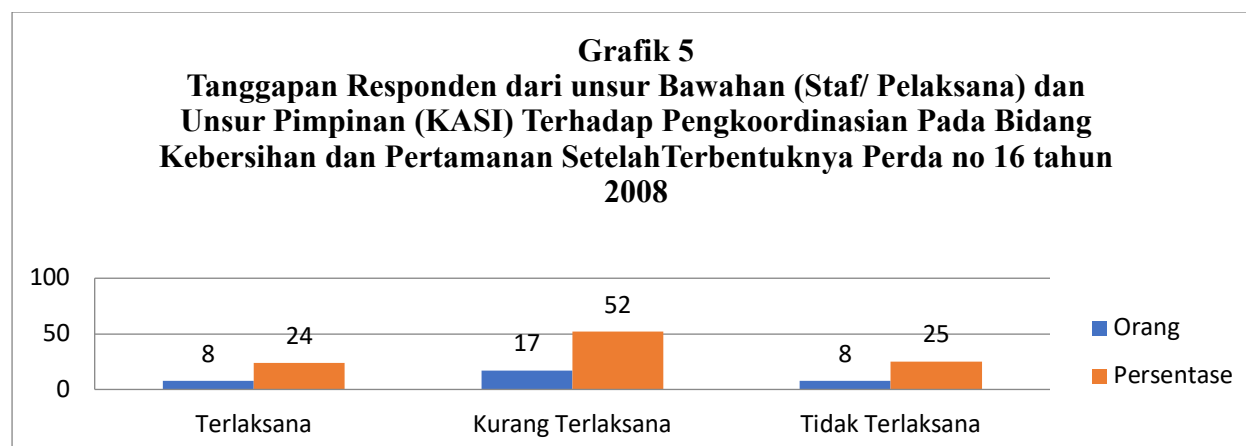
Tabel 5 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbit Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)

No.	Aspek Pengkoordinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan	Responden		Total Responden	Persentase
		Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana)	Unsur Pimpinan (KASI)		
1.	Terlaksana	5 Orang	3 orang	8 Orang	24 %
2.	Kurang Terlaksana	12 Orang	5 Orang	17 Orang	52 %
3.	Tidak Terlaksana	7 Orang	1 Orang	8 Orang	24 %
Jumlah		24 Orang	9 Orang	33 Orang	100 %

Sumber: Data Olah berdasarkan Angket

Berdasarkan Tabel di atas tentang hasil tanggapan responden dari unsur bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai terhadap Aspek Pengkoordinasian Bidang Kebersihan dan Pertamanan setelah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 8 orang (24%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 17 orang (52%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 8 orang (24%).

Hasil ini menunjukkan koordinasi yang dilakukan masih tingginya ego sektoral sebagai akibat perubahan dari pimpinan. Pernyataan tersebut dibenarkan dan dikuatkan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada unsur pimpinan yakni Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang dimana hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Data Olahan Penulis

### Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Kebersihan dan Pertamanan merupakan hal penting guna meningkatkan kinerja pegawai yang ada di Dinas Tata kota, Kebersihan dan pertamanan Kota Dumai. Baik itu pemerintahan maupun swasta pembinaan dan pengendalian kewenangan dalam hal peningkatan mutu kerja sangat dibutuhkan begitu pula halnya dengan Dinas Tata kota, Kebersihan dan pertamanan Kota Dumai sehingga pemahaman tentang arti pentingnya kebersihan dan penataan pertamanan dapat terlaksana dengan baik.

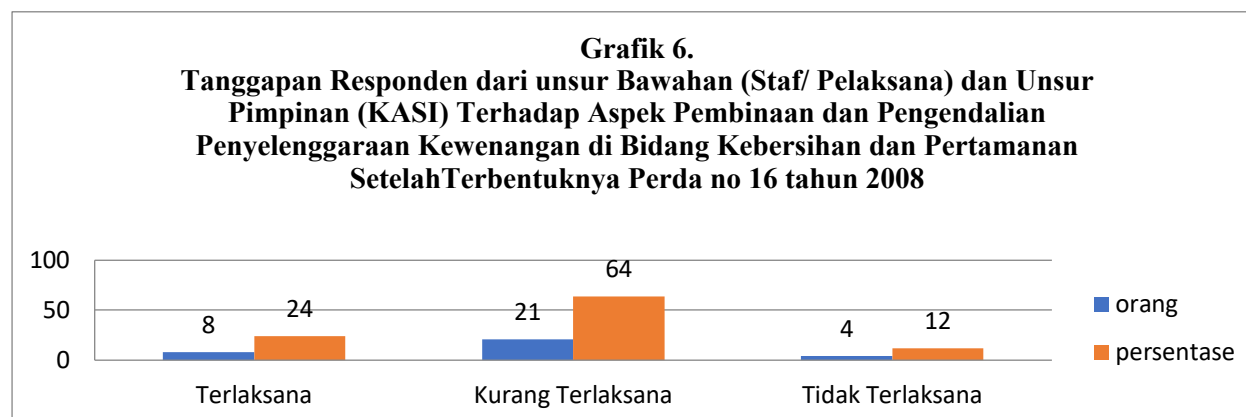
Terhadap Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan setelah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 8 orang (24%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 21 orang (64%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 4 orang (12%)

Tabel 6 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)

No.	Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Responden		Total Responden	Persentase
		Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana)	Unsur Pimpinan (KASI)		
1.	Terlaksana	4 Orang	4 orang	8 Orang	24 %
2.	Kurang Terlaksana	17 Orang	4 Orang	21 Orang	64 %
3.	Tidak Terlaksana	3 Orang	1 Orang	4 Orang	12 %
Jumlah		24 Orang	9 Orang	33 Orang	100 %

Sumber: Data Olah berdasarkan Angket

Hasil ini menunjukkan bahwa Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang dilakukan masih sangat kurang karena kurangnya pemahaman dan keinginan untuk memahami arti penting dari penyelenggaraan bidang kebersihan dan pertamanan, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Data Olahan Penuli

## **Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai**

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Peretamanan Kota Dumai berdasarkan Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan treatment ). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya Kurang Terlaksana dengan baik.

Dalam menghitung rata-rata, disini peneliti menggunakan perumusan Perhitungan rata-rata standar Satu Sampel dimana merupakan salah satu bentuk pengujian data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jawaban sementara yang perlu dilakukan uji adalah: “Jumlah tanggapan tentang apakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Hal Pelaksanaan Kebersihan Dan Pertamanan”. Pengukuran diadaskarkan pada aspek sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah tersebut.

Dikarenakan pengukuran pelaksanaan peraturan daerah ini berdasarkan teori evaluasi Menurut Talizuduhu Ndraha, yaitu Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan:

1. Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
  - a) Terlaksana =18%
  - b) Kurang Terlaksana = 66 %
  - c) Tidak Terlaksana = 16 %
2. Aspek Pengkoodinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan
  - a) Terlaksana =34%
  - b) Kurang Terlaksana = 42 %
  - c) Tidak Terlaksana = 24 %
3. Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan
  - a) Terlaksana =24%
  - b) Kurang Terlaksana = 64 %
  - c) Tidak Terlaksana = 12 %

Menyangkut pertanyaan apakah Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai terhadap pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan sebelum terbentuk maupun sesudah terbentuk peraturan tersebut, maka jawabannya adalah kurang terlaksana dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yang diantaranya:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Sebelum dan sesudah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dari ketiga sapek yang penulis teliti hasilnya masih sama yakni kurang terlaksana dengan baik

karena masih terjadi tumpang tindih (*Overlapping*), lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Hasil dari ketiga aspek tersebut antara lain:

- a. Pelaksanaan dari Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan hitungan kuesioner yang penulis berikan kepada 24 orang responden dari unsur bawahan (staf/ Pelaksana) dan 9 orang responden dari unsur Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi yang ada di Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Kurang terlaksana dengan baik karena tingkat pemahaman dari pembuat dan pemberi kebijakan teknis dalam hal kebersihan dan pertamanan tidak tepat sasaran sehingga tumpang tindih pekerjaan (*overlapping*) tidak dapat dihindari.
  - b. Pelaksanaan dari Aspek Pengkoodinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan hitungan kuesioner yang penulis berikan kepada 24 orang responden dari unsur bawahan (staf/ Pelaksana) dan 9 orang responden dari unsur Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi yang ada di Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Kurang terlaksana dengan baik yang mengakibatkan masing-masing SKPD saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.
  - c. Pelaksanaan dari Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan hitungan kuesioner yang penulis berikan kepada 24 orang responden dari unsur bawahan (staf/ Pelaksana) dan 9 orang responden dari unsur Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi yang ada di Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Kurang terlaksana dengan baik sehingga pemahaman terhadap penyelenggaraan kewenangan pada bidang kebersihan dan pertamanan berakibat kepada tumpang tindih (*Overlapping*) pekerjaan dan kebijakan antara SKPD yang ada di Kota Dumai.
2. Perubahan status dari Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam hal pelaksanaan kebersihan dan pertamanan ternyata tidak dapat meningkat kinerja Dinas dikarenakan:
    - a. Perubahan regulasi ternyata tidak berdampak terhadap pelaksanaan kebersihan dan pertamanan dikarenakan perubahan tersebut terkesan separuh hati dan kurang matang, hal ini dapat dilihat dari perubahan regulasi tidak diiringi dengan penajaman tugas pokok dan fungsi dari regulasi yang dirubah tersebut.
    - b. Kurangnya pembinaan terhadap pegawai sehingga pegawai yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Dumai kurang bersemangat, malas dan tidak berkembang akibatnya kreatifitas dari pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai tidak ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Awang Azam dan Mendra Wijaya. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Alaf Riau; Pekanbaru.
- Chaidir, Ellydar, 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Doni, D., Yogya, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.

- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Ibrahim Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan*. Mandar Maju. Bandung.
- Kencana Inu Syafie. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Martono, Nanang, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhadjir Noeng, 2004. *Metodelogi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nasution, S, 2006. "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*" Jakarta, Bumi Aksara,
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Computindo, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2011. *Bukan Salah Ibu Mengandung Tapi Bapa Salah Memandang*. Sirao Credentia Center. Tangerang.
- Nugroho Riant D. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 43-56.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing " Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of " Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35-47.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Sedermayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), bagian kedua. Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). *Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr. 2005. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa, edisi kelima*. Prenada Media. Jakarta.
- Yogya, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
- Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19-36.
- Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province. In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 122-125). Atlantis Press.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).